

**Pengelolaan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Website
(Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Buleleng)**

Oleh : Gusde Mahardika^{*1} dan Putu Agustana^{*2}

Abstraksi

Penelitian atas dimensi pengelolaan informasi publik dan mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pelayanan informasi hampir di segala aspek kehidupan yang menjadi sebuah permasalahan, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui informasi yang disediakan dalam website *bulelengkab.go.id*; (2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Buleleng; (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Buleleng

Objek penelitian merupakan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yakni halaman website *bulelengkab.go.id* yang dikelola pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada pengelolaan halaman website *bulelengkab.go.id* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa informasi publik yang tersedia pada website *bulelengkab.go.id* merupakan keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. Dihat dari standar kriteria yang tertuang dalam UU KIP NO. 14 Tahun 2008, bahwa halaman website *bulelengkab.go.id* belum secara optimal memberikan informasi kepada masyarakat, hal ini dikarenakan masih dilakukannya penataan ulang konten website akibat dari perubahan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di awal Tahun 2017. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan website *bulelengkab.go.id* telah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik, hal ini terlihat dari tingginya minat kunjungan website dan telah terintegrasinya beberapa aplikasi berbasis internet/online ke dalam website *bulelengkab.go.id*. Hal yang menjadi kendala bagi pengelolaan website *bulelengkab.go.id* yakni masalah jaringan internet, masih lemahnya kualitas maupun kuantitas SDM/tenaga ahli dibidang informasi dan teknologi dan kendala lainnya, sehingga pemanfaatan media website *bulelengkab.go.id* untuk mendukung pengelolaan informasi publik di Kabupaten buleleng masih perlu dibenahi demi terciptanya keterbukaan informasi publik dan *good governance*.

Kata Kunci: Informasi Publik, Keterbukaan Informasi, Pemerintah Daerah.

^{*1} Alumni Fisip Unipas

^{*2} Staf Pengajar FISIP Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara (*borderless world*) seolah menjadi hilang akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah. Hal ini juga mendukung hasil penelitian Kharade (2016), yang menyatakan bahwa *E-Government* dapat digunakan untuk memobilisasi

sumberdaya pemerintah dan memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah.

Pentingnya informasi yang sangat cepat dan tepat adalah sudah menjadi sebuah kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu ciri dalam era demokratisasi yang maju adalah adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan juga menjadi sebuah kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggaraan *good governance* yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, kini informasi semakin mudah didapatkan oleh masyarakat. Baik di desa maupun di kota, kemudahan akses informasi ini tak lepas dari semakin berkembangnya internet yang telah masuk di beberapa desa di Indonesia. Pemerintah daerah juga lebih mudah untuk memberikan informasi kepada warga baik melalui media cetak dan media elektronik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Layanan Informasi Publik Online dan media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik.

Website saat ini merupakan media yang paling sering dibuka oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kemudahan untuk mengakses internet. Oleh karena itu, website harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin, karena masyarakat akan sangat tertarik jika website tersebut sangat bagus. Website merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman web beserta file-file pendukungnya, seperti file gambar, video, dan file digital lainnya yang disimpan pada sebuah web server yang umumnya dapat diakses melalui internet. Atau dengan kata lain, website adalah sekumpulan folder dan file yang mengandung banyak perintah dan fungsi fungsi tertentu, seperti fungsi tampilan, fungsi menangani penyimpanan data, dan sebagainya.

Salah satu asas dalam UU KIP mengatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Hal ini mengandung arti bahwa badan publik harus

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat yang akan melihat, mengetahui atau meminta informasi publik dapat terlayani sesuai dengan asas tersebut. Dalam hal ini, pilihan media yang akan dipergunakan untuk pelayanan informasi publik menjadi penting. Terdapat empat dimensi penting dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui *e-government*, yaitu : 1) *information attractiveness* (informasi yang menarik), 2) *information usefulness* (pemanfaatan informasi), 3) *information awareness* (kesadaran informasi) dan 4) *ease navigation* (kemudahan mengelola) hal ini terungkap dalam hasil penelitian Wirtz, dkk (2016) . Beberapa daerah bahkan telah mensahkan perda transparansi serta membentuk komisi transparansi sebagai upaya untuk mendukung kehadirannya. Setidaknya terdapat beberapa kabupaten / kota yang telah menerapkan gerakan transparansi tersebut salah satunya dengan membangun situs website resmi sebagai sumber informasi publik, diantaranya adalah di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Buleleng hadir dengan website resmi *bulelengkab.go.id* yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat Kabupaten Buleleng dalam mengawasi proses pengambilan keputusan publik serta mewujudkan penyelenggaraan *good governance* di Kabupaten Buleleng, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administratif dan pelayanan barang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng adalah dengan memanfaatkan jaringan internet yang berbentuk website. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji website *bulelengkab.go.id* atas dimensi pengelolaan informasi publik, dimana pengelolaan informasi publik disini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan uraian dalam latar belakang

masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Informasi apa saja yang disediakan oleh website *bulelengkab.go.id*?
- 2) Bagaimana pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi di Kabupaten Buleleng?
- 3) Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi di Kabupaten Buleleng?

2. Metode Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penulisan tersebut. Selanjutnya penulis memberikan gambaran secara cermat tentang penggunaan website *bulelengkab.go.id* sebagai media keterbukaan informasi publik di Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini, informan yang dimintai keterangan yaitu pengelola website *bulelengkab.go.id* yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Layanan E-Government, Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government dan Petugas / Operator Entry Data Website pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng. Penunjukan informan tersebut dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang terlibat didalamnya memahami permasalahan dan mampu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini informan tidak dibatasi jumlahnya, melainkan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Informasi yang disediakan dalam website *bulelengkab.go.id*, berupa informasi berkala, informasi serta merta, informasi tersedia setiap saat dan informasi berdasarkan permintaan.
- 2) Pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi di Kabupaten Buleleng, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi di Kabupaten Buleleng, baik kendala internal maupun eksternal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Informasi yang Disediakan Website *bulelengkab.go.id*

Website *bulelengkab.go.id* jika dibedakan menurut sifat dari website sebagaimana didefinisikan oleh Hartono (2014), maka masuk dalam dua sifat sekaligus, yakni bisa disebut website dinamis sebab konten atau isinya selalu berubah-ubah setiap saat, dikarenakan adanya berita berupa *press release* dan informasi yang terus diperbaharui. Di sisi lain, website ini juga tergolong website statis karena kontennya yang berkaitan dengan profil pemerintahan, visi dan misi, tentunya akan jarang berubah selama beberapa periode. Mengacu pada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, informasi menurut jenis layanan dan jangka waktunya terdiri :

a. Informasi Berkala

Berdasarkan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, informasi berkala diberikan oleh Badan Publik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada penerima informasi yang dalam hal ini adalah masyarakat secara umum. Informasi berkala dapat dikatakan sebagai informasi yang berubah sewaktu-waktu berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan pada saat tertentu.

b. Informasi Serta Merta

Informasi serta merta adalah informasi yang seketika diberikan pada saat terjadinya suatu kejadian (*event*) atau fakta (*fact*). Pada website *bulelengkab.go.id*, informasi serta merta belum disediakan menu khusus. Namun, untuk

memfasilitasi informasi-informasi mendadak yang sifatnya *urgent*, masyarakat dapat menemukannya pada menu berita. Informasi yang tersedia pada menu berita selalu di-*update* pada saat terjadi suatu kejadian seperti misalnya bencana alam yang terjadi di wilayah pemerintahan Kabupaten Buleleng.

c. Informasi Tersedia Setiap Saat

Yang dimaksud dengan informasi tersedia setiap saat adalah informasi yang dapat langsung diberikan pada saat diminta oleh yang memerlukan informasi. Namun, pada prakteknya informasi tersedia setiap saat adalah informasi yang sudah ada dan sudah disediakan oleh website. Pada website *bulelengkab.go.id*, informasi yang tergolong dalam informasi tersedia setiap saat yakni seluruh informasi terkait keputusan maupun kebijakan Pemkab Buleleng yang dapat diakses melalui submenu produk hukum, Bank Data atau langsung diakses melalui subdomain pada masing-masing OPD.

d. Informasi Berdasarkan Permintaan

Informasi berdasarkan permintaan merupakan informasi yang diberikan kepada yang memerlukan informasi pada saat diminta. Biasanya, informasi berdasarkan permintaan memerlukan waktu maksimum 10 + 7 hari kerja hingga tersedianya informasi tersebut.

Pada website *bulelengkab.go.id*, informasi berdasarkan permintaan disediakan pada kolom “Kontak Kami” atau menu “Kritik Saran”. Pengunjung dapat memberikan kritik, saran ataupun meminta informasi yang diinginkan dimana nantinya petugas operator akan memberikan respon pertanyaan atau permintaan tersebut. Respon ini diperlukan untuk dapat memperbaiki system layanan pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui system layanan IT, “*taken the responsibility to enlighten their customers a bout the policy*” (Onuigho & Innocent, 2016).

3.2 Pengelolaan Website dalam Mendukung Pelayanan Keterbukaan Informasi

Halaman website *bulelengkab.go.id* sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, Nomor

800/02/Kominfosandi/2017, dikelola oleh seorang staf atau tenaga Operator Entry Data Website dibawah naungan Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, yang akan melakukan kegiatan pengelolaan situs website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng secara kontinyu dan dinamis.

Terdapat 4 (empat) tahap dalam pengelolaan website yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

a. *Planning* (Perencanaan)

Pada tahap perencanaan pengelolaan website, petugas operator entry data dibantu oleh berbagai tim peliputan dari masing-masing OPD untuk menyiapkan informasi-informasi yang akan dituangkan dalam website. Informasi-informasi yang diterima oleh petugas operator entry data kemudian dipilah dan dipilih terlebih dahulu untuk selanjutnya ditempatkan pada posnya masing; yakni pada menu atau kolom yang sesuai.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengelolaan website *bulelengkab.go.id* dilaksanakan melalui pengorganisasian yakni pembagian tugas sebagai berikut:

- 1) Petugas entry data kabupaten yang bertanggung jawab atas seluruh data maupun informasi yang sudah maupun yang akan diunggah ke website.
- 2) Tim Peliputan yang bertugas dalam meliput berita maupun informasi sekaligus melakukan editing sebelum diserahkan kepada petugas entry data.
- 3) Petugas entry data di masing-masing OPD yang bertugas mengelola informasi di masing-masing wilayah kerja hingga melakukan entry data ke website *bulelengkab.go.id* di bawah pengawasan dan koordinasi dengan petugas entry data kabupaten.

c. *Actualizing* (Pelaksanaan)

Seluruh informasi yang telah disetujui kemudian dipublikasikan pada konten menu yang sesuai. Petugas operator entry data melakukan *update* pada setiap menu sesuai dengan waktu layanan yakni berkala, serta merta, tersedia setiap saat ataupun berdasarkan permintaan. Khusus untuk informasi berdasarkan permintaan, petugas operator entry data mempunyai tugas memberikan tanggapan

serta menyediakan informasi yang diminta sesuai dengan batas waktu yang dibutuhkan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam mengelola website pemerintah, pengawasan merupakan tahap yang tidak boleh dilewatkan. Informasi-informasi yang tertuang dalam website merupakan hal-hal krusial yang menjadi cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengawasan juga diperlukan guna meminimalisir terjadinya kesalahan informasi yang disampaikan.

3.3 Kendala dalam Pengelolaan Website *bulelengkab.go.id*

Mengelola website pemerintah kabupaten merupakan tanggung jawab yang besar. Hal ini dikarenakan banyak tugas yang perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dalam pengelolaan website. Demi terciptanya pengelolaan website yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terpenuhinya keterbukaan informasi publik melalui media website tentu tidak terlepas dari kendala-kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website dapat bersumber dari internal maupun eksternal website.

- a. Kendala Internal seperti dari Sumber Daya Manusia (SDM), Jaringan, Perangkat dan Anggaran Dana.
- b. Kendala Eksternal, misalnya dalam rangka mengumpulkan informasi/berita/data untuk diupload ke web dan adanya virus atau hacker yang menembus keamanan website.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Website *bulelengkab.go.id* belum secara optimal memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya semenjak diadakannya penataan ulang OPD di lingkup Pemkab Buleleng pada awal tahun 2017 yang berdampak pada berubahnya tampilan dan konten website. Namun secara umum website *bulelengkab.go.id* telah memenuhi standar kriteria yang tertuang

dalam UU KIP No. 14 Tahun 2008 yakni berdasarkan jenis layanan dan waktu informasi (informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan berdasarkan permintaan). Informasi publik yang tersedia yakni keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam sehari-hari.

- 2) Website *bulelengkab.go.id* dikelola oleh DiskominfoSandi dengan menunjuk satu orang sebagai petugas operator entry data dengan dibantu oleh petugas-petugas operator lainnya di masing-masing subdomain di seluruh OPD. Website *bulelengkab.go.id* telah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik meskipun pada beberapa subdomain masih belum optimal pengelolaannya. Pengelolaan website *bulelengkab.go.id* telah mengalami perkembangan sejak diintegrasikannya beberapa aplikasi berbasis sistem internet/*online* ke dalam website *bulelengkab.go.id*.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website *bulelengkab.go.id* yakni kendala internal seperti masalah jaringan internet, kurangnya SDM dan dana untuk pengembangan Informasi dan Teknologi (IT) serta kendala eksternal seperti misalnya serangan virus dan hacker yang dapat menyebabkan gangguan pada pengelolaan website. Namun kendala-kendala tersebut sedapat mungkin diminimalisir dengan melakukan langkah-langkah pencegahan maupun upaya-upaya pemecahannya.

Berdasarkan simpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan berupa saran - saran sebagai berikut:

- 1) Website *bulelengkab.go.id* beserta subdomainnya agar segera difungsikan secara optimal untuk pemenuhan informasi publik, mengingat kebutuhan dan minat masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan cukup tinggi. Dengan berfungsinya website resmi pemerintah diharapkan mampu menyediakan informasi serta layanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa seperti yang telah diwacanakan. Selain itu, perlu juga disediakan kolom atau menu khusus untuk memudahkan masyarakat

mengakses informasi yang terklasifikasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan berdasarkan permintaan.

- 2) Seluruh link yang terintegrasi dalam website *bulelengkab.go.id* agar dimanfaatkan secara maksimal dan jika memang diperlukan adanya penambahan aplikasi/link/opsi agar mencakup secara detail penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng. Perlu juga diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan website yang ada untuk berkomunikasi dengan pemerintah.
- 3) Perlu kiranya disediakan dana yang memang secara khusus dianggarkan untuk pengelolaan website *bulelengkab.go.id*. Selain itu, SDM yang siap dan ahli di bidang IT juga segera direkrut dan diperbanyak *training/pelatihan* tentang IT karena website resmi pemerintah saat ini merupakan salah satu hal krusial yang perlu diperhitungkan keberadaannya demi terciptanya keterbukaan informasi publik dan *good governance*.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Rineka Cipta, Jakarta.
- Arista, Dessy. (2015). *Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*. Universitas Hasannudin, Makasar.
- Hartono, J. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman)* (Vol. 6). BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.
- Kharade, Jyoti, 2016. "G2C-Governance Project Implementation at Local Level In A Pune Division context". In *BVIMSR's Journal of Management Research Vol. 8 Issue -1 April 2016*.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ming, Kim. (2014). Evaluasi Kualitas Website Ditinjau Dari Kepuasan User Dengan Web Analytic (Studi Kasus Pada Website Majalah Livingetc Indonesia) tersedia pada jurnalinformatika.petra.ac.id/index.php/inf/article/view/18989

- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Onuigho, Richard & eme, Okechukwu Innocent, 2015. "electronic Governance & Administration In Nigeria: Prospects & Chalengges" *In Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 5, 3; jctober 2015*.
- Pangestu, Danu Wira. 2007. *Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. Diunduh pada Januari 2017 pada <http://www.ilmukomputer.com>
- Putrie, I.P. (2015). *Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Humas PT. PLN Persero dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wirtz, Bernd W, Robert Piehler, Vanessa Rieger & Peter Daiser, 2016. "E-Government Portal Information performance and The Role of Local Communication Interest Emperical Support for A Model of Citizen Perceptions. In *PAQ Spring, 2016*.